

Nomor : 5275/1/HK.00.03/12/2025
Tanggal : 12 Desember 2025

ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
1.	a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial dan mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial, perlu pengaturan mengenai asistensi rehabilitasi sosial. b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi	Adanya regulasi asistensi rehabilitasi sosial yang sudah dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini.	Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan: 1. Pancasila, Sila ke-5, butir 3; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.	Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang	Tidak Ada	Peraturan Menteri Sosial ini terdiri atas IX Bab dan 35 Pasal meliputi: a. ketentuan umum; b. pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial; c. sentra kreasi asistensi rehabilitasi sosial; d. pendamping sosial bidang rehabilitasi sosial; e. pendataan; f. tanggung jawab; g. pembinaan dan pengawasan; h. pemantauan dan evaluasi; i. pendanaan; j. ketentuan lain-lain; dan k. ketentuan penutup.

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
	Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti.			Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504).		

Sekretaris Jenderal,

Robben Rico